

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman

Dewi Septiani Sukma¹, Rasyidah Mustika², Eliyanora³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, dseptianisukma@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, titik.mustika@gmail.com

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, eliyanora@pnp.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengendalian intern, keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari

Received : 02-12-2022

Accepted : 02-01-2023

Published : 27-02-2023

This study aims to determine the effect of the quality of human resources, the use of information technology and internal control on the reliability of the financial reporting of the nagari government in Padang Pariaman Regency. This research is a quantitative research. Methods of data collection by using a questionnaire that was distributed directly. The population of this research is all nagari governments in Padang Pariaman Regency. The research sample amounted to 51 people. The data analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS version 25 program. The results showed that the quality of human resources had no positive effect on the reliability of the nagari government's financial reporting, the use of information technology had a positive effect on the reliability of the nagari government's financial reporting, and internal control had a positive effect on the reliability of the nagari government's financial reporting.

Pendahuluan

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Indriasari & Nahartyo, 2008)

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Dengan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, maka dapat menyebabkan implikasi terhadap manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik. Fungsi dari informasi dalam laporan keuangan tidak akan mempunyai manfaat jika penyampaian dan penyajian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu.

Dalam laporan keuangan pemerintah saat ini masih banyak terdapat penyimpangan dan juga belum menyajikan data laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena banyaknya tuntutan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah untuk dapat menerapkan akuntabilitas publik melalui suatu media pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah supaya informasi yang dihasilkan andal. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Informasi Pelaporan Keuangan merupakan fungsi pelaporan keuangan yang harus menyajikan informasi keuangan yang andal sehingga laporan keuangan tersebut dapat sebagai pengambilan

keputusan dalam mengalokasikan dana. Pelaporan keuangan dikatakan andal apabila dalam penyajiannya terdapat fakta-fakta secara jujur dan relevan serta dapat diverifikasi atau proses menentukan kebenaran penyajian laporan keuangan. Jika dalam penyajian laporan keuangan tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi laporan keuangan tidak dapat mempercayai informasi yang telah disajikan (Primayana, Atmadja, Darmawan, 2014).

Pemerintah mengalokasikan dana nagari secara nasional dalam APBN setiap tahun, menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 dana nagari dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pada tahun 2021, total dana nagari sebesar Rp 28,82 triliun atau 40,02 persen dari Rp72 triliun yang dianggarkan telah dicairkan. Dana nagari telah dicairkan ke 69,661 nagari atau sebesar 92,93 persen dari 75.961 nagari di Indonesia (Kompas.com, 2021).

Besarnya jumlah penyaluran dana nagari yang diberikan kepada pemerintah nagari, menuntut pemerintah nagari untuk menyajikan laporan keuangan yang andal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan dari kinerja perangkat nagari itu sendiri. Karakteristik dari laporan keuangan pemerintah nagari sangat berkaitan dengan laporan keuangan, salah satunya yaitu keandalan pelaporan keuangan. Menurut Ariesta (2013), keandalan pelaporan keuangan adalah suatu kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Oleh karena itu, pemerintah nagari harus mampu memberikan informasi yang andal atau valid, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta-fakat secara jujur dan relevan serta dapat diverifikasi sehingga masyarakat percaya dan menyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar (Wardani, 2017).

Menurut Wardani (2017), keandalan yang mempengaruhi penyusunan pelaporan keuangan nagari adalah kualitas sumber daya manusia. Pemerintah nagari harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan pemerintah nagari dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya dan juga memiliki pengalaman yang luas dibidang keuangan. Untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusia tersebut dalam penerapan sistem akuntansi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak terjadi kesalahan. Dalam pengelolaan keuangan nagari yang baik, pemerintah nagari harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan nagari, didukung dengan latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, serta mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal (Wardani, 2017).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Selain adanya kualitas sumber daya yang baik, pemerintah nagari berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan nagari dan menyalurkan informasi keuangan nagari kepada pelayanan publik. Teknologi informasi merupakan teknologi yang memiliki kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pada pemerintahan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah, Darwanis, Bakar, 2012). Pemanfaatan teknologi informasi ini akan membantu sumber daya manusia dalam kecepatan pemrosesan transaksi dalam penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan juga dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, lebih akurat dan konsisten dari pada menggunakan proses manual (Indriasari & Nahartyo, 2008).

Menurut Komarasari (2017), keandalan yang mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah nagari adalah pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*), sehingga laporan keuangan memberikan keyakinan terhadap keandalan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh perangkat nagari dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebuah sistem pengendalian intern yang baik tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, tetapi sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya penyelewengan dan kesalahan dalam batas-batas yang dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan dilakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari. 2) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari. 3) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah nagari.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Hajra (2020), teori keagenan menyatakan bahwa secara umum hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal*. Dalam akuntabilitas publik pihak agen memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terbagi atas 2 macam yaitu sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas vertikal, adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas lebih tinggi seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat.
- b. Akuntabilitas horizontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pada akuntansi sektor publik dalam pemerintahan, pemerintah sebagai agen berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan andal bagi pengguna informasi laporan keuangan pemerintah dalam perannya sebagai *principal* yang berhak membuat keputusan ekonomi, sosial, politik, dan menilai akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam pelaporan keuangan yang andal. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang andal tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu yang dilandasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja yang menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) menurut Irmawati dalam (Hajra, 2020)

Untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan sistem akuntansi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak terjadi kesalahan. Ilmu akuntansi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari, dalam pengelolaan keuangan nagari yang baik, pemerintah nagari harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan nagari, didukung dengan latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal (Wardani, 2017).

Kompetensi yaitu suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*),

pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Komponen dalam pembentukan kompetensi sumber daya manusia yaitu :

- a. Pengetahuan adalah ilmu yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang dimilikinya.
- b. keterampilan (*skill*) adalah suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah, diselesaikan dengan baik dengan *skill* yang dimiliki.
- c. Sikap adalah tingkah laku seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sistem berbasis ilmu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam memproses, menyusun dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi yang akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, dan jenis teknologi lainnya. Teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja pemerintahan terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah et al., 2012).

Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan proses kerja secara elektronik agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah sehingga pemanfaatan teknologi dalam akuntansi mampu menciptakan laporan keuangan yang andal, cepat serta memiliki keakuratan data untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah nagari dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan dalam penyusunan pelaporan keuangan pemerintah nagari yang awalnya dilakukan secara manual dilihat tidak efektif, efesien dan nilai keandalan suatu pelaporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah sangat dibutuhkan salah satunya komputer yang dapat membantu mempercepat pekerjaan, lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal (Primayana et al., 2014).

Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan seperangkat prosedur dan kebijakan untuk kebijakan yang berlaku (Shofa, Wafirotn, Wijayanti, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesiamelindungi kekayaan atau aset organisasi, mengecek ketelitian data dari tindakan penyalahgunaan, menjamin tersediannya informasi akuntansi yang akurat, serta memastikan seluruh perangkat nagari mematuhi peraturan perundang-undangan serta No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern digunakan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku dan harus dipatuhi untuk meminimalisir kecurangan dan kesalahan dalam penyajian pelaporan keuangan pemerintah nagari. Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut, sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian (Wardani, 2017).

Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari

Laporan keuangan adalah catatan informasi pada suatu entitas dengan suatu periode akuntansi yang dapat digunakan dengan tujuan tertentu dan dapat menggambarkan kinerja suatu entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan pada suatu entitas. Menurut Munawir dalam (Hajra, 2020), pelaporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi

antara data keuangan atau aktivitas suatu instansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Pengelolaan keuangan nagari dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Keandalan Pelaporan Keuangan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid (Hajra, 2020). Keandalan pelaporan keuangan harus menyajikan informasi secara jujur dan dapat diverifikasi dalam setiap laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah nagari telah ditentukan berdasarkan empat karakteristik dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang informasi pelaporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pelaporan keuangan yang andal memenuhi karakteristik, yaitu :

1. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar.
2. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan hasil yang sama.
3. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Hipotesis

Kualitas sumber daya adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu fungsi atau kewenangannya pada suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan dengan secara efektif dan efisien. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik dalam pengelolaan keuangan nagari maka akan menghasilkan laporan keuangan yang andal, sehingga sumber daya manusia mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi. Semakin baik kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah nagari (Wardani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dari Wardani (2017), membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa Kabupaten Klaten.

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemandirian teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan meyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam kecepatan pemrosesan transaksi dalam penyusunan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, lebih akurat dan konsisten dari pada menggunakan proses manual (Indriasari & Nahartyo, 2008). Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi seperti *hardware* maupun *software* maka akan mengakibatkan keandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Oleh karena itu,

pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari. Berdasarkan hasil penelitian dari Karmila et al (2014), membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Riau.

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern merupakan seperangkat prosedur dan kebijakan untuk melindungi kekayaan atau aset organisasi, mengecek ketelitian data dari tindakan penyalahgunaan, menjamin tersediannya informasi akuntansi yang akurat, serta memastikan seluruh perangkat nagari mematuhi peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku (Shofa et al., 2020) . Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pengendalian intern maka akan mengakibatkan pelaporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik dan andal. Berdasarkan hasil penelitian Komarasari (2017), menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H3 : Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang berupa angka-angka menggunakan statistik (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2016).

Kriteria dalam penelitian ini yaitu perangkat nagari yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pemerintah nagari atau staf keuangan pemerintah nagari dengan item pertanyaan pada kuesioner yang akan diberikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara (Sugiyono, 2016). Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan langsung kepada responden yaitu perangkat pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang mengelola keuangan nagari dengan menggunakan skala likert 1-4, yaitu: 1) Sangat tidak setuju (STS), 2) Tidak setuju (TS), 3) Setuju (S), 4) Sangat setuju (SS).

Pada penelitian ini dilakukan uji kualitas data dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid dan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak valid. Data dapat dikatakan reliabel jika instrumen pernyataan menghasilkan data konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Cronbach Alpha* > 0.70 , maka data dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2018). Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi pada variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak normal, suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05. Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji multikolonieritas dapat digunakan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ maka regresi tersebut

tidak terjadi multikolonieritas dan jika nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali (2018). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Salah satu cara yang dilakukan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas.

Hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahap ini dilakukan uji koefisien determinasi (R^2), uji T, dan uji F. Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, jika nilai mendekati 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji T bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan 0,05, jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima atau nilai f hitung dengan nilai f tabel, jika nilai f hitung $>$ nilai f tabel maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika f hitung $<$ nilai f tabel maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2018). Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima atau nilai f hitung dengan nilai f tabel, jika nilai f hitung $>$ nilai f tabel maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika f hitung $<$ nilai f tabel maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2018).

Hasil Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	51	22	32	26,37	2,02
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	51	19	28	22,29	2,41
Pengendalian Intern (X3)	51	11	20	15,49	1,60
Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari (Y)	51	18	28	21,86	2,04

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71347323
Most Extreme Differences		Absolute
		Positive
		Negative
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.068 ^c

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan *One Sampel Kolmogrov Smirnov* sebesar 0.068 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

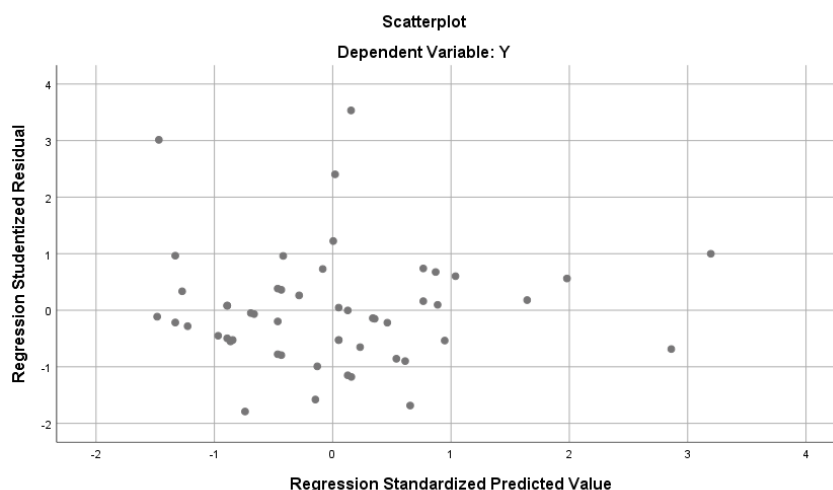
Variabel	Tolerance	VIF
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,587	1,703
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,603	1,659
Pengendalian Intern (X3)	0,874	1,144

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* >0,10 dan nilai VIF <10. Sehingga dapat simpulkan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas yang artinya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, maka variabel tersebut layak digunakan untuk menganalisis ke tahap selanjutnya.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan gambar diatas, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dapat dilihat bahwa titik-titik penyebaran pada grafik *scatterplot* tidak hanya berada diatas dan dibawah saja, tetapi menyebar disekitaran angka 0 pada sumbu Y, penyebaran titik-titik tersebut tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Uji Analisis Linear Berganda

	Unstandardized B
(Constant)	7,834
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,086

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,290
Pengendalian Intern (X3)	0,342

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,834 + 0,086(X_1) + 0,290(X_2) + 0,342(X_3)$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Nilai konstanta (α) sebesar 7,834 yang menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern dianggap konstan sebesar 7,834, 2) Nilai koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 0,086, yang artinya variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari sebesar 0,086, 3) Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,290, yang artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari sebesar 0,290, 3) Nilai koefisien regresi variabel pengendalian intern bernilai sebesar 0,342, yang artinya variabel pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan nagari sebesar 0,342.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,549 ^a	0,301	0,256	1,76731

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi pada *adjust R square* sebesar 0.256. Angka tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 25.6% sisanya sebesar 74,4%.

Uji Statistik T

Tabel 6
Uji Statistik T

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,205	0,032
	Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,536	0,595
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	2,171	0,035
	Pengendalian Intern (X3)	2,052	0,046

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai $>0,05$ yang berarti variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari, sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern memiliki nilai $<0,05$ yang berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Uji Statistik FTabel 7
Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	t	Sig.
1	Regression	63,240	3	21,080	6,749	0,001 ^b
	Residual	146,800	47	3,123		
	Total	210,093	50			

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai f hitung 6.749 > dari nilai f tabel 2.798. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel.

Pembahasan**Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari**

Nilai signifikan pada variabel kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari sebesar 0,595 > 0,05 dan nilai t hitung 0.536 < 2.012 menunjukan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmila et al (2014) dan penelitian Komarasari (2017).

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari

Nilai signifikan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari sebesar 0,035 < 0,05 dan nilai t hitung 2.171 > 2.012 menunjukan H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi seperti *hardwere* maupun *software* maka akan mengakibatkan keandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Primayana et al (2014), Karmila et al (2014) dan Komarasari (2017).

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari

Nilai signifikan pada variabel kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari sebesar 0,046 < 0,05 dan nilai t hitung 2.052 > 2.012 menunjukan H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pengendalian intern maka akan mengakibatkan pelaporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik dan andal. Penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) dan penelitian yang dilakukan Marlinawati & Wardani (2018).

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut adalah kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Penelitian ini dilakukan di pemerintah nagari Kabupaten Padang Pariaman.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern, sedangkan variabel dependen adalah keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman
3. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari.
5. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan supaya dalam mengumpulkan data tidak hanya menggunakan metode kuesioner, namun juga bisa melalui wawancara sehingga lebih memperkuat hasil dari penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat menambah atau mengganti dengan variabel lain yang berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Referensi

- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). *E-Journal Universitas Negeri Padang*, 1, 1-15.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 25*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajra, D. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dikabupaten Wajo* (Vol. 15, Issue 2).
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposiumnasional Akuntansi (Sna) Ke Xi Pontianak*, 23 - 24 Juli 2008, April, 5-24.
- Karmila, Tanjung, A. R., & Darlis, E. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal SOROT Vol 9 NO 1 April Hal 1-121*, 9(1), 1-121.
- Komarasari. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(2), 65-66.
- Kompas.com. (2021). *Dana Nagari*. Ditelusuri 11 Juli 2022. <https://money.kompas.com>.
- Marlinawati, & Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 26(2), 131-143.
- Padangpariamankab.go.id. (2016). *Pemekaran Seluruh Nagari Kabupaten Padang Pariaman*. Ditelusuri 13 Juli 2022. <https://padangpariamankab.go.id>.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman. (2018). *Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat*

- Nagari*. Ditelusuri 15 Juli 2022. <http://jdih.padangpariamankab.go.id>.
- Peraturan Daerah (PERDA). (2013). *Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman*. Ditelusuri 18 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat. (2018). *Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang NAGARI*. Ditelusuri 18 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permendagri). (2018). *Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari*. Ditelusuri 19 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Informasi Pelaporan Keuangan*. LN. 2010 No. 123, TLN No. 5165, LL SETNEG : 7 HLM. Ditelusuri 19 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Pemerintah (PP). (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Ditelusuri 20 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Pemerintah (PP). (2014). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Ditelusuri 20 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (60 C.E.). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 2008. Ditelusuri 20 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Primayana, Atmadja., Darmawan. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Putri, A. K. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah pada OPD di Provinsi DIY. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 4, Issue 1).
- Sartika, D., & C.W, R. Y. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur. *Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, 1–20.
- Shofa, A., Wafirotn, K. Z., & Wijayanti, I. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Madiun). *JIMAT (Jurnal ...)*, 6(1), 128–144.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wansyah, H., Darwanis, & Bakar, U. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 16.
- Wardani. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98.